

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang terpenting yang mempengaruhi perekonomian, baik secara mikro maupun secara makro. Fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Dalam usahanya, lembaga keuangan berusaha menarik nasabah baru, memperbesar aset dan memperbesar pemberian kredit serta jasa yang ditawarkan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/23/PBI/2009 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Atau lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/ kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan maupun usaha kecil menengah. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual

maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif (Muhammad, 2005:15)

Dalam perbankan syariah, termasuk BPRS yang salah satu usahanya menyalurkan pembiayaan, yang merupakan *asset* terbesar atau penghasilan terbesar selalu dihadapkan dengan resiko, yang sering disebut dengan istilah resiko pembiayaan. Resiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan berkurangnya profitabilitas bagi bank apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya. Untuk itu bank dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu naiknya tingkat pembiayaan bermasalah. Resiko pembiayaan bank syariah diukur dengan rasio *non performing financing* (NPF). NPF adalah salah satu indikator stabilitas perbankan syariah yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin tinggi pula pembiayaan yang bermasalah. Rasio NPF merupakan paling krusial dalam sektor perbankan. Hal ini dikarenakan pengaruhnya terhadap kinerja bank melalui tingkat profitabilitas yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki *asset* kecil seperti pada BPRS.

Seiring perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, yang ditunjukkan oleh terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Hal tersebut mengakibatkan tingkat inflasi mengalami kenaikan. Untuk

mencegah atau menurunkan tingkat inflasi, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter dengan memperkecil atau menaikkan suku bunga (Nopirin, 2000: 34).

Iklm bisnis yang tidak kondusif ini menyebabkan tingkat pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya tingkat NPF pada dunia perbankan, termasuk juga BPRS. Jika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang, maka dapat mempengaruhi kinerja bank melalui tingkat profitabilitas yang berujung pada berhentinya operasional perbankan, terutama pada BPRS yang memiliki *asset* kecil. Berikut ini data makroekonomi yang diwakili oleh nilai tukar, inflasi, dan *BI rate*, serta rasio NPF pada Bank Umum Syariah dan BPRS.

Tabel 1.1 Data variabel makroekonomi, NPF Bank Umum Syariah dan NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

| Tahun | Nilai Tukar (Rp) | Inflasi (%) | BI Rate (%) | NPF BUS (%) | NPF BPRS (%) |
|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2010 | 8946 | 6.96 | 6.5 | 3.02 | 6.5 |
| 2011 | 9023 | 3.79 | 6 | 2.52 | 6.11 |
| 2012 | 9662 | 4.3 | 5.75 | 2.22 | 6.15 |
| 2013 | 12128 | 8.38 | 7.5 | 2.62 | 6.5 |
| 2014 | 12378 | 8.36 | 7.75 | 4.33 | 8.81 |
| 2015 | 13265 | 7.26 | 7.5 | 4.76 | 9.38 |

Sumber: Bank Indonesia dan statistik perbankan OJK (data diolah tahun 2015)

Tabel 1.1 menunjukkan perubahan variabel makroekonomi, NPF BUS, dan NPF BPRS dari tahun 2010 sampai Juni 2015. Perubahan nilai tukar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Namun dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup tinggi di bandingkan tahun- tahun lainnya. Sedangkan untuk variabel inflasi dan *BI Rate*, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013. Ketiga variabel makroekonomi tersebut, sama-sama mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2012 ke tahun 2013. Seiring dengan naiknya variabel makroekonomi, rasio NPF BPRS juga mengalami kenaikan pada tahun 2011 sampai 2015. Berbeda dengan NPF Bank Umum Syariah, mengalami kenaikan pada tahun 2012 sampai 2015. Dengan adanya kenaikan nilai tukar dan tingkat inflasi, serta *BI Rate*, NPF BPRS lebih tinggi dibanding NPF Bank Umum Syariah, yaitu mencapai lebih dari 5%.

Penelitian tentang variabel makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, antara lain: nilai tukar yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan konvensional (Zakiyah dan Yulizar, 2011). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan Siti (2012) nilai tukar berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Karena pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar, nilai produk dalam negeri menjadi murah dibanding dengan produk luar negeri, dengan demikian ekspor meningkat. Sementara itu untuk perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari negara lain kurang diuntungkan karena barang impor menjadi lebih mahal. Fluktuasi nilai tukar

rupiah terhadap dollar ini membuat dunia usaha dalam melakukan pembiayaan menjadi terganggu (Listiono: 2015).

Variabel lain yang mempengaruhi NPF adalah inflasi. Inflasi terjadi dimana harga barang dan jasa naik dalam periode tertentu. (Mankiw, 2007: 16). Kenaikan harga bahan baku menyebabkan penurunan produksi barang pada perusahaan. Selain itu harga barang juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Dengan demikian, kejadian tersebut menyebabkan menurunnya angka pembiayaan atau bahkan mengakibatkan pembayaran pembiayaan yang tidak lancar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah dan Yulizar (2011) bahwa inflasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap NPF di perbankan syariah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan Siti (2012), inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah pada BUS.

Selain kedua variabel diatas, terdapat pula variabel *BI Rate*. Menurut Yulita (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *Bi Rate* secara signifikan berpengaruh positif terhadap NPL. Peningkatan suku bunga akan memperburuk kualitas dari pembiayaan, semakin tingginya biaya pinjaman membuat debitur semakin sulit membayarkan pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, tingkat NPF pada BPRS lebih tinggi daripada NPF Bank Umum Syariah. Disisi lain, terdapat perlambatan ekonomi yang ditandai oleh adanya nilai tukar yang terdepresiasi, tingkat inflasi mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh variabel makroekonomi yang diwakili oleh nilai

tukar, inflasi, dan *BI Rate* terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS. Sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyaluran pembiayaan, agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Mengingat bahwa pembiayaan merupakan salah satu usaha perbankan yang merupakan *asset* atau penghasilan terbesar yang dimiliki oleh perbankan, yang selalu dihadapkan dengan resiko yang disebut dengan resiko pembiayaan. Apabila resiko pembiayaan bermasalah (NPF) semakin tinggi maka itu akan sangat mengganggu aktifitas atau operasional bank, karena tingkat profitabilitas semakin menurun. Dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JUNI 2010-JUNI 2015”**

B. Rumusan Masalah

Pada data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2010-2011 menyatakan bahwa tingkat NPF pada BPRS lebih tinggi daripada NPF Bank Umum Syariah. Dalam periode yang sama terjadi perlambatan ekonomi yang ditandai oleh adanya nilai tukar yang terdepresiasi, tingkat inflasi mengalami kenaikan. Oleh sebab itu menjadi penting untuk korelasi antara kondisi makroekonomi dengan tingkat NPF BPRS di Indonesia. Dalam hal ini rumusan masalah yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS ?
3. Bagaimana pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS.
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah BPRS.
3. Untuk menganalisis pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan bermasalah BPRS .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap permasalahan dalam

dunia perbankan, terutama tentang faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BPRS.

- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya bagi jurusan Ekonomi dan Perbankan islam serta dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor-faktor makroekonomi yang dapat mengganggu kegiatan operasional perbankan dan mengurangi profitabilitas.

E. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka penulis membatasi pemilihan periode ini, yaitu Juni 2010- Juni 2015. Karena dalam tahun tersebut, terjadi peningkatan NPF pada BPRS di Indonesia. Dan variabel variabel yang digunakan, yaitu nilai tukar, inflasi, *BI Rate*, dan pembiayaan bermasalah.